

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang

telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, Artikel). Oleh karena itu Sumber penerimaan negara yang merupakan dana publik harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan publik pemerintah pusat dilakukan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No.32 Tahun 2004). Hakikat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. Saragih dalam halim(2012:17).

Perkembangan kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 Dan UU No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah masing-masing. Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (Fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain mengingat sistem pengelolaan pemerintah daerah sebelumnya masih tersentralisasi.

Terselenggaranya *GoodGovernance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. *Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka diwujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu segenap komunitas dalam negara menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu komunitas yang memberikan tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya adalah Masyarakat. Holzer & Rabin dalam Halim (2012:18).

Namun pada kenyataannya, permasalahan didalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik/ masyarakat masih menyisakan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah

Kota Gorontalo juga sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip-prinsip akuntansi yang diberlakukan. Namun terkait dengan pelaporan keuangannya pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK bahwa laporan keuangan Kota Gorontalo tahun anggaran 2009 hingga 2011, penyajian laporan keuangan Kota Gorontalo masih mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau *Qualified Opinion* dari BPK. BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Pemerintah Kota Gorontalo telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP, namun masih ada beberapa yang belum disajikan sesuai dengan SAP yang menyebabkan laporan keuangan Kota Gorontalo tersebut masih mendapat opini WDP, diantaranya 1) Penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp 1.788.384.902,00 pada neraca tidak disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan berpotensi tidak tertagih, 2) penatausahaan barang milik daerah di SKPD dan Bagian Aset DPPKAD tidak tertib sebesar Rp 580.581.466.375,20 sehingga penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya, 3) realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah digunakan tidak sesuai ketentuan sehingga pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2009 disajikan lebih sebesar Rp 1.786.525.000,00. 4) perbedaan saldo akhir SILPA TA 2007 dan saldo awal SILPA TA 2008 sebesar Rp 2.806.293.816,52 belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga terdapat potensi adanya ketidakabsahan belanja Tahun 2007 yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Kas, Utang

PFK dan Ekuitas Dana Lancar SILPA per 31 Desember 2009
(www.bpkp.co.id)

Permasalahan lain yang timbul adalah terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut disebabkan adanya kendala di beberapa sektor, diantaranya dokumentasi maupun sinerginitas. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Kota khususnya di DPPKAD Kota Gorontalo telah membentuk Asistensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekaligus melakukan penetapannya. Hal tersebut dilakukan dalam tujuan mewujudkan *good government*, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercantum pada rencana strategi (gorontalokota.go.id). Selain sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan keuangan yang baik, LAKIP juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja, menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala SKPD bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala SKPD dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala SKPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang -

undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggung jawabkan kepada bupati/ walikota/ gubernur.

Penelitian Azlim Darwanis (2012) dengan Judul Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan SAP Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD dikota Banda Aceh. Kesimpulan dari penelitan tersebut adalah *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2013) dengan judul Pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jawa Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Government governace* dengan akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan pada dinas pertanian tanaman provinsi jawa barat.

Hal yang sama juga tercantum dalam penelitian Elvira Zeyn (2011), dengan judul Pengaruh penerapan *Good Governance* dan SAP Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Sukamara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara artinya penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Dari permasalahan, uraian dan beberapa penelitian yang telah dijelaskan peneliti menarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan Pada DPPKAD Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh adanya penerapan *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Lambatnya penyampaian laporan keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut disebabkan adanya kendala di beberapa sektor, diantaranya dokumentasi maupun sinerginitas. Sehingga masih sulit untuk mewujudkan *good government governace*, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di DPPKAD Kota Gorontalo.
2. Belum maksimalnya penyajian laporan keuangan Karena masih ada beberapa yang belum disajikan sesuai dengan SAP yang menyebabkan laporan keuangan Kota Gorontalo tersebut masih mendapat opini WDP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah Penerapan *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Goeontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap KualiatasLaporan Keuangan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian inimempunyai dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari peneitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Pengaruh Penerapan *Good Governance* TerhadapKualitas Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk mengimplementasikan *Good Governance* TerhadapKualitas Laporan keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

